

KONDISI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) INDONESIA

Rinda Noviyanti¹

Universitas Terbuka, Jakarta

rinda@ut.ac.id

ABSTRAK

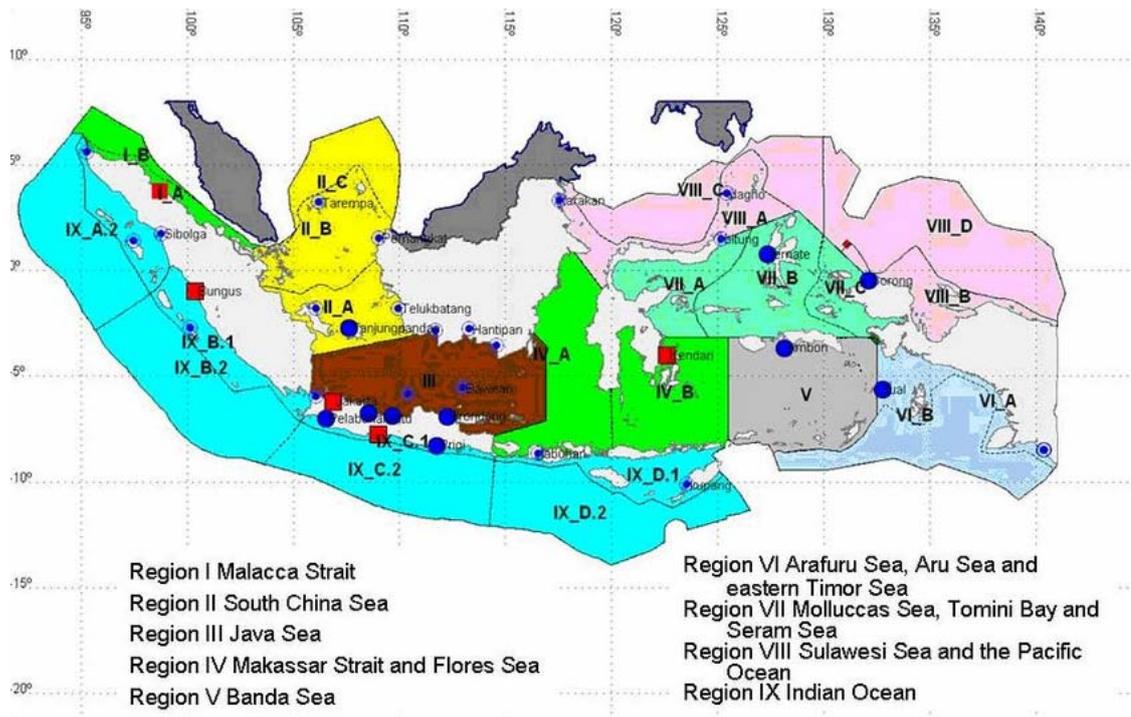
Aktivitas usaha perikanan tangkap umumnya tumbuh dikawasan sentra nelayan dan pelabuhan perikanan yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia. Pengelolaan perikanan di Indonesia terbagi menjadi 10 wilayah yang disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores dan Selat Makasar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini dan Laut Maluku, Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera serta Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan perikanan tangkap di setiap WPP. Perkembangan perikanan tangkap di 10 WPP belum merata dan masih ada beberapa WPP yang *over fished* untuk beberapa jenis ikan, yaitu ikan demersal di WPP Selat Malaka; udang di WPP Selat Malaka, Laut Flores dan Selat Makasar, serta Laut Arafura; ikan pelagis kecil di WPP Laut Cina Selatan dan Laut Jawa; ikan pelagis besar di Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Untuk WPP yang masih bisa dikembangkan adalah Teluk Tomini dan Laut Maluku untuk ikan demersal; Laut Cina Selatan untuk Udang; Laut Flores dan Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini dan Laut Maluku, serta Samudra Hindia sebelah selatan Jawa untuk ikan pelagis kecil; Laut Banda untuk pelagis besar. Komitmen dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab merupakan salah satu hal yang membuat perkembangan perikanan tangkap Indonesia cenderung tidak merata. Komitmen tersebut harus diwujudkan dengan mengendalikan perikanan tangkap untuk menjamin kelestarian sumberdaya berdasarkan *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF) yang dikeluarkan oleh FAO.

Kata kunci: Perikanan tangkap, WPP, kelestarian sumberdaya, CCRF

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap sebagai sistem yang memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia perlu dikelola yang berorientasi pada jangka panjang (*sustainability management*). Tindakan manajemen perikanan tangkap adalah mekanisme untuk mengatur, mengendalikan dan mempertahankan kondisi sumber daya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. Salah satu kunci manajemen ini adalah status dan tren aspek sosial ekonomi dan aspek sumber daya. Data dan informasi status dan tren tersebut dapat dikumpulkan baik secara rutin (statistik) maupun tidak rutin (riset).

Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia saat ini terdapat 39 unit sumber daya perikanan yang tersebar di seluruh WPP, yaitu terdiri dari WPP I Selat Malaka, WPP II Laut Cina Selatan, WPP III Laut Jawa, WPP IV Laut Flores dan Selat Makasar, WPP V Laut Banda, WPP VI Laut Arafura, WPP VII Teluk Tomini dan Laut Maluku, WPP VIII Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi, WPP IX Samudra Hindia sebelah barat Sumatera serta WPP X Samudra Hindia sebelah selatan Jawa (Gambar 1). Pada setiap WPP terdapat 4 unit sumber daya ikan, yaitu ikan demersal, udang, ikan pelagis besar, dan ikan pelagis kecil.



Gambar 1. Lokasi dan Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Ikan demersal merupakan jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, dapat dikatakan juga bahwa ikan demersal adalah ikan yang tertangkap dengan alat tangkap ikan dasar seperti trawl dasar (*bottom trawl*), jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), dan bubu. Beberapa jenis ikan demersal contohnya kerapu (*Serranidae* Spp.), kakap (*Lates calcarifer*), merah (*Lutjanidae* Spp.), beronang (*Siganus* Spp.), dan lencam (*Lethrinus* Spp.). Ikan yang hidup di lapisan permukaan perairan pantai atau di perairan pantai dinamakan ikan pelagis. Ikan pelagis ini terbagi menjadi 2, pelagi besar (tenggiri (*Scomberonous commerson*), tongkol (*Euthynnus* Spp.), dan tuna (*Thunnus* Spp.)) dan pelagis kecil (teri (*Stelephorus* Spp.), tembang (*Sardinella fimbriata*), kembung (*Rastrelliger* Spp.), julung-julung (*Hemirhamohus* Spp.), dan belanak (*Mugil* Spp.))

Kebijakan perikanan global khususnya perikanan tangkap, bersifat mengendalikan upaya penangkapan ikan agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan yang dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan. Untuk mewujudkan kebijakan perikanan global tersebut, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah menerbitkan suatu pedoman untuk membantu otoritas pengelola, pelaku usaha perikanan, termasuk di dalamnya pengusaha penangkapan ikan, pengusaha budidaya ikan, pelaku usaha pengolahan dan perdagangan komoditas perikanan hingga peneliti perikanan. Pedoman tersebut berupa issue pengelolaan perikanan, yaitu *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF). Petunjuk ini

terbuka bagi setiap negara untuk menerapkannya secara sukarela, beberapa bagian didalamnya dibuat berdasarkan hukum internasional yang berlaku (Sondita, 2010). CCRF menyajikan sejumlah prinsip dan acuan yang dapat diterapkan dalam konservasi, pengelolaan dan pembangunan semua jenis perikanan, dan sejumlah aspek perikanan, seperti hasil tangkapan, pengolahan dan perdagangan ikan dan produk perikanan, operasi penangkapan ikan, budidaya perikanan, penelitian, dan keterpaduan perikanan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Sampai saat ini pertumbuhan aktivitas usaha perikanan tangkap di Indonesia masih belum optimal, bahkan banyak diantara daerah sumber daya ikan tersebut mengalami kemunduran yang berdampak pada minimnya kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan nelayan. Kondisi ini diperjelas dengan rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan, serta belum optimalnya integrasi usaha perikanan tangkap di daerah dengan pengembangan wilayah setempat. Menurut Sitanggang (2008), pengelolaan perikanan tangkap seyogianya didasarkan pada kajian biologis, ekonomis dan sosial, sementara aspek teknis dikembangkan seirama dengan ketiga aspek tersebut.

METODE

Tulisan ini merupakan hasil studi literatur yang dikumpulkan dari buku referensi, artikel dalam jurnal, dan buku pedoman yang kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan uraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang hidup dan berada di kawasan pesisir dan laut selalu termarginalkan dan miskin. Geliat pembangunan dan usaha untuk memajukan sektor kelautan, ternyata masih dibawah bayangan semu. Potensi perikanan yang mencapai angka 6,4 juta ton.tahun, potensi garis pantai yang mencapai 81.000 km, potensi negara kepulauan dengan 17.500 buah pulau, potensi sumber daya terumbu karang yang mencapai 85.000 km², potensi kawasan budidaya 24.528.178 ha pada kenyataannya belum dapat meningkatkan ekonomi nelayan (Yonvitner, 2007).

Pemerintah telah berusaha untuk memajukan sektor perikanan dengan membagi wilayah pengelolaan menjadi 10 bagian, dengan harapan di tiap-tiap wilayah akan terbenuk suatu usaha perikanan yang maju, baik itu dari usaha penangkapan, budidaya maupun pengolahan. Khusus untuk penangkapan telah didapatkan data status sumber daya ikan di 10 WPP sebagai berikut (Komisi Pengkajian Stok Ikan dalam Sondita, 2010)

Tabel 1. Status Sumber Daya Ikan di 10 WPP Menurut Komisi Pengkajian Stok Ikan

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Demersal	Udang	Pelagis Kecil	Pelagis Besar
I	Selat Malaka	<i>Overfished</i>	<i>Overfished</i>	<i>Fully exploited</i>	<i>Uncertain</i>
II	Laut Cina Selatan	<i>Fully exploited</i>	<i>Moderate</i>	<i>Overfished</i>	<i>Uncertain</i>
III	Laut Jawa	<i>Fully exploited</i>	<i>Fully exploited</i>	<i>Overfished</i>	<i>Uncertain</i>
IV	Laut Flores dan selat Makasar	<i>Fully exploited</i>	<i>Overfished</i>	<i>Moderate</i>	<i>Uncertain</i>
V	Laut Banda	<i>Under-Exploited/ Uncertain</i>	<i>Uncertain</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
VI	Laut Arafura	<i>Fully exploited-overfished</i>	<i>Overfished</i>	<i>Moderate</i>	<i>Uncertain</i>
VII	Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	<i>Moderate</i>	-	<i>Moderate</i>	<i>Fully exploited</i>
VIII	Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi	<i>Uncertain</i>	<i>Uncertain</i>	-	<i>Overfished</i>
IX	Samudra Hindia sebelah barat Sumatera	<i>Fully exploited</i>	<i>Fully exploited</i>	<i>Moderate</i>	<i>Fully exploited</i>
X	Samudra Hindia sebelah selatan Jawa	<i>Fully exploited</i>	<i>Fully exploited</i>	<i>Fully exploited</i>	<i>Fully exploited</i>

Berdasarkan Tabel 1 dapat dikatakan bahwa untuk jenis ikan demersal hanya Teluk Tomini dan Laut Sulawesi yang masih bisa untuk dikembangkan, sedangkan untuk daerah lain semuanya sudah dieksplorasi secara maksimal, bahkan untuk Selat Malaka sudah melebihi batas eksplorasi (kelebihan upaya penangkapan ikan/*overfished*). Khusus WPP Selat Malaka hanya ikan pelagis besar yang tidak tersedia data pemanfaatannya, sedangkan untuk jenis ikan demersal dan udang pemanfaatannya sudah *overfished* yang merupakan pertanda bahwa harus segera dilakukan regulasi pengelolaan pemanfaatan agar tidak terjadi penurunan stok atau sumber daya. Pasal 7.6.3 CCRF menyebutkan “Bila terjadi penangkapan ikan yang melebihi kapasitas harus ditetapkan mekanisme untuk mengurangi kapasitas ke tingkat yang sepadan dengan pemanfaatan lestari sumber daya perikanan, sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa para nelayan beroperasi dalam kondisi ekonomi yang mendorong perikanan yang bertanggungjawab. Mekanisme seperti itu harus termasuk kapasitas armada penangkapan”. Regulasi di bidang penangkapan sudah dilakukan dengan menghindari penambahan kapal, waktu penangkapan ikan serta peralatan yang digunakan diatur secara ketat (DKP Propinsi Riau, 2010). Selain untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebihan, dikeluarkan juga aturan tentang pelarangan penggunaan racun dan bahan peledak untuk menghindari kerusakan lingkungan sebagaimana tertulis dalam pasal 8.4.2 CCRF “Negara-negara harus melarang praktek penangkapan ikan yang

menggunakan bahan peledak dan racun serta praktek penangkapan ikan yang merusak lainnya”.

Untuk jenis udang, pemanfaatan masih bisa dikembangkan untuk WPP Laut Cina Selatan, tetapi tetap harus melihat batas-batas kelestarian sumber daya tersebut. Hal ini dijelaskan pada pasal 7.1.8 CCRF yang menyatakan “Negara-negara, harus mengambil langkah untuk mencegah atau menghapus penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dan harus menjamin bahwa tingkat upaya penangkapan adalah sepadan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang lestari sebagai suatu cara menjamin keefektifan langkah konservasi dan pengelolaan”. Khusus penangkapan udang, pemerintah melalui kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengendalikan penangkapan ikan (dan udang) akan menggenjot perikanan budidaya, hal ini terungkap dalam Sidang *Committee on Fisheries* (COFI) ke-28 di Roma, Italia, pada awal Maret 2009 lalu (DKP Propinsi Riau, 2010). Masa depan perikanan Indonesia tergantung kepada perikanan budidaya, mengingat perikanan tangkap produksinya makin menurun, sementara kebutuhan ikan makin meningkat .

Jenis ikan yang masih bisa untuk dimanfaatkan lebih jauh adalah pelagis kecil. Dari 10 WPP, masih ada 5 wilayah yang tingkat pemanfaatannya *moderate* yaitu Laut Flores dan selat Makasar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini dan Laut Sulawesi, serta Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Jenis ikan ini umumnya ditangkap dengan menggunakan purse seine, rawai, maupun huhate. Ketiga jenis alat tangkap ini sudah sesuai dengan standar penggunaan alat tangkap yang tertulis pada pasal 8.5.1 CCRF “Negara-negara harus mensyaratkan bahwa alat, metode, dan praktek penangkapan ikan, sejauh bisa dilaksanakan, agar cukup selektif sedemikian rupa sehingga meminimumkan limbah, ikan buangan, hasil tangkapan spesies bukan target baik spesies ikan maupun spesies bukan ikan serta dampak terhadap spesies yang terkait atau tergantung dan bahwa maksud dari peraturan terkait tidak diabaikan oleh peranti teknis. Sehubungan dengan ini, para nelayan harus bekerjasama dalam pengembangan alat dan metode penangkapan yang selektif. Negara harus menjamin bahwa informasi tentang perkembangan dan persyaratan yang terbaru tersedia bagi semua nelayan”.

Untuk jenis ikan peruaya jauh (pelagis besar), pengelolaannya harus merujuk pada CCRF dimana pada pasal 7.1.3 dituliskan “Bagi stok ikan pelintas batas, stok ikan *straddling*, stok ikan peruaya jauh dan stok ikan laut lepas, yang diusahakan oleh dua Negara atau lebih, maka Negara bersangkutan, termasuk Negara pantai yang relevan dalam hal stok yang *straddling* dan ikan peruaya jauh tersebut, harus bekerjasama untuk menjamin konservasi dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Upaya ini harus dicapai, jika perlu, melalui pembentukan sebuah organisasi atau tatanan bilateral, subregional atau regional.” WPP yang sudah mengupayakan penangkapan ikan pelagis besar secara berlebih adalah Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Kelebihan upaya penangkapan ini akan menyebabkan

laju pengambilan ikan melebihi laju penambahan alamiah ikan yang berdampak pada berkurangnya kemampuan stok ikan untuk memulihkan diri.

Untuk mengatur suatu usaha perikanan serta untuk mencapai tujuan-tujuan eksploitasi yang telah ditetapkan, semua pihak hanya bisa berperan secara langsung melalui dua cara yaitu dengan mengatur upaya tangkap total, atau dengan melakukan perubahan sebaran usaha tangkap menurut klas umur dan spesies yang membentuk stok (sediaan alami) ikan. Untuk WPP yang telah mengalami kelebihan upaya penangkapan, pembatasan penangkapan harus ketat dilakukan. Jika masih ada WPP yang bisa menampung upaya penangkapan dari WPP yang *overfished*, seyogyanya segera mengalihkan penangkapan ke WPP yang masih dalam tingkat *moderate*.

KESIMPULAN

Perkembangan perikanan tangkap di 10 WPP belum merata dan masih ada beberapa WPP yang *over fished* untuk beberapa jenis ikan, yaitu ikan demersal di WPP Selat Malaka; udang di WPP Selat Malaka, Laut Flores dan Selat Makasar, serta Laut Arafura; ikan pelagis kecil di WPP Laut Cina Selatan dan Laut Jawa; ikan pelagis besar di Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Untuk WPP yang masih bisa dikembangkan adalah Teluk tomini dan Laut Maluku untuk ikan demersal; Laut Cina Selatan untuk Udang; Laut Flores dan Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk tomini dan Laut Maluku, serta Samudra Hindia sebelah selatan Jawa untuk ikan pelagis kecil; Laut Banda untuk pelagis besar. Khusus WPP Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa, semua jenis ikan sudah termanfaatkan dengan sangat optimal (*fully exploited*).

DAFTAR PUSTAKA

FAO. 1995. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Rome.

<http://diskanlutriau.net/artikel/arrah-kebijakan-pengembangan-usaha-penangkapan-ikan/>

diunduh tanggal 26 Juni 2011

Sondita, M.F.A. (2010). *Manajemen Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sitanggang, E.P. (2008). *Landasan Pengembangan Perikanan Tangkap*. Pacific Journal, Vol. 2 (2):154-163.

Yonvitner. (2007). *Produktivitas Nelayan, Kapal dan Alat Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Jurnal Perikanan, IX (2):254-266.

KEMBALI KE DAFTAR ISI